

## ANALISIS PEMENTUKAN LIMA SIKAP POLITIK MELALUI SOSIALISASI POLITIK PADA PEMILIH PEMULA

Maulidina Qurrota A'yunina<sup>1</sup>, Karim Suryadi<sup>2</sup>, Supriyono<sup>3</sup>  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung  
E-mail: \*[maulidinaqurrota@upi.edu](mailto:maulidinaqurrota@upi.edu)<sup>1</sup>, [karimsuryadi@upi.edu](mailto:karimsuryadi@upi.edu)<sup>2</sup>, [supriyono@upi.edu](mailto:supriyono@upi.edu)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan lima sikap politik yaitu niat untuk memilih, minat dalam politik, kepercayaan pada lembaga, kepercayaan umum (public trust), dan toleransi etnis melalui proses sosialisasi politik pada pemilih pemula. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali secara mendalam bagaimana pengalaman, interaksi sosial, serta pengaruh dari berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, media, dan lingkungan sebaya membentuk kesadaran dan sikap politik di kalangan generasi muda. Temuan menunjukkan bahwa sosialisasi politik memiliki peran penting dalam membangun karakter politik pemilih pemula, meskipun pengaruhnya bervariasi tergantung pada intensitas paparan dan kualitas informasi yang diterima. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan politik yang kontekstual dan berkelanjutan guna mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam sistem demokrasi.

### Kata kunci

**Pembentukan, Sikap politik, Sosialisasi politik, Pemilih pemula**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the formation of five political attitudes, namely the intention to vote, interest in politics, trust in institutions, public trust, and ethnic tolerance through the process of political socialization in young voters. Using a qualitative approach, this study explores in depth how experiences, social interactions, and the influence of various socialization agents such as family, school, media, and peer groups shape political awareness and attitudes among the younger generation. The findings show that political socialization plays an important role in building the political character of young voters, although influence varies depending on the intensity of exposure and the quality of information received. This study emphasizes the importance of strengthening contextual and sustainable political education in order to encourage active participation of the younger generation in the democratic system.*

### Keywords

**Formation, Political attitude, Political socialization, First-time voters**

## 1. PENDAHULUAN

Peran pemilih pemula dalam sistem demokrasi sangatlah krusial karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan arah dan kualitas demokrasi di masa depan. Pemilih pemula, yang biasanya berusia antara 17 hingga 21 tahun, adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum. Karena itulah, partisipasi aktif mereka dalam proses politik tidak hanya mencerminkan kesehatan demokrasi saat ini, tetapi juga menjadi indikator bagi keberlanjutan sistem demokrasi itu sendiri. Pemilih pemula memiliki potensi besar untuk membawa energi, ide, dan perspektif baru yang segar dalam proses politik, sehingga keikutsertaan mereka sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang representatif dan akuntabel (Dalton, 2014).

Pemilih pemula adalah gerbang awal pendidikan politik bagi generasi muda. Melalui partisipasi mereka dalam pemilu, jiwa dan semangat nasionalisme dapat tumbuh dan mengawal jalannya demokrasi (Purta, 2002). Karena jumlahnya yang cukup besar dan antusiasme yang tinggi, pemilih pemula memiliki kekuatan pengaruh yang signifikan

dalam hasil pemilu (Norris, 2002). Mereka adalah calon pemimpin masa depan yang diharapkan mampu membawa perubahan dan kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai generasi yang baru pertama kali menggunakan hak suara, pemilih pemula memiliki potensi untuk mempengaruhi arah kebijakan dan masa depan negara (Smith & Lee, 2023). Mereka sering kali memiliki pandangan yang lebih progresif dan berani dalam menghadapi isu-isu sosial, politik, dan lingkungan. Dengan partisipasi mereka, demokrasi dapat menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Pemilih pemula juga memiliki karakteristik yang unik, yakni cenderung belum melek politik dan pemahamannya tentang politik masih minim. Mereka rentan terhadap pengaruh kepentingan politik tertentu dan mudah berubah-ubah dalam menentukan pilihan (Johnson et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan politik yang memadai dan sosialisasi yang efektif agar pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pemula masih jauh dari optimal. Banyak dari mereka yang kurang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menggunakan hak suara (Martinez & Chen, 2023). Hal ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya pendidikan politik yang memadai, rasa apatis terhadap kondisi politik yang ada, hingga ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang membuat mereka enggan terlibat. Ketidakpahaman tentang proses pemilu dan kurangnya informasi yang akurat dapat mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi (O'Neill & Ramirez, 2024). Dalam konteks ini, sosialisasi politik memainkan peran yang sangat penting sebagai sarana untuk membentuk karakter dan sikap politik pemilih pemula.

Sosialisasi politik merupakan proses pembelajaran dan internalisasi nilai, norma, dan sikap politik yang berlangsung sejak dini dan terus berkembang seiring waktu (Anderson & Smith, 2023). Melalui sosialisasi politik, pemilih pemula dapat memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta memahami mekanisme dan pentingnya partisipasi dalam sistem demokrasi (Garcia & Lee, 2024). Lebih dari itu, sosialisasi politik juga bertujuan membentuk sikap politik yang konstruktif, seperti niat untuk memilih, minat dalam politik, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, public trust, dan toleransi terhadap perbedaan sosial dan etnis.

Sosialisasi politik memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap politik generasi muda. Proses sosialisasi politik adalah cara individu belajar dan menginternalisasi nilai, norma, sikap, dan perilaku politik yang berlaku dalam masyarakat. Melalui sosialisasi politik, pemilih pemula memperoleh pengetahuan tentang sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta nilai-nilai demokrasi yang harus dijunjung tinggi (Nguyen et al., 2023). Sosialisasi ini terjadi melalui berbagai agen, seperti keluarga, sekolah, media massa, dan lingkungan sosial. Keluarga sebagai agen pertama sangat berpengaruh dalam menanamkan nilai-nilai politik sejak dini, sementara media massa dan teknologi informasi memberikan akses luas terhadap informasi politik yang membantu generasi muda membentuk opini dan sikap politik yang lebih kritis.

Fungsi sosialisasi politik meliputi menanamkan nilai-nilai dan norma politik, mengenalkan visi dan misi partai politik, meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat, serta memperkaya pemahaman dan kesadaran politik (Singh & Kumar, 2023). Dengan sosialisasi politik yang efektif, generasi muda dapat menghindari apatisisme politik dan menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Mereka mampu menilai dan memilih secara rasional dalam pemilu, menolak praktik korupsi dan politik uang, serta mendorong orang lain untuk turut serta dalam proses demokrasi (Garcia &

Lee, 2024). Oleh karena itu, sosialisasi politik tidak hanya membentuk sikap politik individu, tetapi juga menjaga kelangsungan budaya politik yang sehat dan demokratis dalam masyarakat.

Tanpa proses sosialisasi politik yang kuat, generasi muda berisiko menjadi apatis, tidak peduli terhadap isu-isu publik, atau bahkan mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Di era digital saat ini, di mana arus informasi begitu cepat dan tidak selalu dapat dipercaya, kebutuhan akan sosialisasi politik yang berbasis nilai dan logika demokrasi menjadi semakin mendesak. Pendidikan politik yang tepat baik melalui kurikulum sekolah, diskusi publik, maupun media sosial yang bertanggung jawab perlu menjadi bagian integral dari upaya membentuk warga negara muda yang sadar politik dan mampu berperan aktif dalam sistem demokrasi.

Penelitian ini menghasilkan satu rumusan masalah yaitu "Bagaimana pengaruh sosialisasi politik terhadap pembentukan sikap politik generasi muda, mencakup niat memilih, minat politik, kepercayaan pada lembaga politik, kepercayaan interpersonal, dan toleransi etnis?". Dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi politik membentuk lima sikap politik utama, yaitu niat memilih, minat terhadap politik, kepercayaan pada lembaga politik, kepercayaan umum, dan toleransi etnis. Melalui proses sosialisasi yang berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, media, dan masyarakat, individu mulai mengenal dan menginternalisasi nilai-nilai politik yang mendorong partisipasi serta sikap positif terhadap keberagaman dan sistem demokrasi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode survey. Penelitian survey merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dalam bentuk sampel dari sebuah populasi. Dalam penelitian survey, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Desain dari penelitian ini adalah pendekatan cross sectional atau potong silang. Penelitian cross sectional yaitu peneliti melakukan observasi dan pengukuran variabel pada suatu saat tertentu. Kata suatu saat bukan berarti semua subjek diamati tepat pada saat yang sama, tetapi artinya tiap subjek hanya diobservasi satu kali dan tidak melakukan tindak lanjut terhadap pengukuran yang dilakukan (Sastroasmoro, 2011).

Instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan secara online melalui *google* formulir. Kuesioner merupakan sebuah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan didalamnya berisi pertanyaan dan pernyataan yang dijawab oleh responden. Kuesioner digunakan untuk mengetahui bagaimana pendapat dari responden mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, bahasa nasional, dan warga negara yang baik. Adapun prosedur yang dilakukan oleh penulis yaitu, pertama menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam pengisian kuesioner. Kedua, menyusun instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam kuesioner untuk mengetahui pemahaman mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, bahasa nasional, dan warga negara yang baik. Setelah tahap penyusunan instrumen, kemudian penulis membagikan kuesioner kepada siswa SMAN 2 Sumedang secara online melalui *google* formulir.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sosialisasi politik merupakan suatu proses di mana individu memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan orientasi politik yang berlaku dalam masyarakat. Melalui

proses ini, seseorang belajar mengenal sistem politik, memahami peran dirinya sebagai warga negara, serta mengembangkan sikap dan perilaku politik yang sesuai dengan norma dan nilai demokrasi (Martinez & Chen, 2023). Sosialisasi politik menjadi sarana utama dalam pembentukan kesadaran politik dan keterlibatan individu dalam kehidupan politik, baik dalam skala lokal maupun nasional. Dalam konteks yang lebih luas, sosialisasi politik juga berfungsi sebagai mekanisme pelestarian budaya politik dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta sebagai alat untuk membentuk karakter warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab (Garcia & Patel, 2024).

Bentuk dari sosialisasi politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sosialisasi politik langsung dan tidak langsung. Sosialisasi politik langsung terjadi secara formal dan terstruktur, misalnya melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah atau pelatihan politik yang diberikan oleh lembaga resmi. Sementara itu, sosialisasi politik tidak langsung berlangsung secara informal melalui interaksi sosial sehari-hari, seperti percakapan dalam keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, konsumsi media massa, atau keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan. Kedua bentuk sosialisasi ini saling melengkapi dan berkontribusi dalam membentuk persepsi serta sikap politik individu (Anderson & Smith, 2023).

Agen-agen sosialisasi politik adalah pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai dan informasi politik kepada individu. Agen ini meliputi keluarga, yang merupakan lingkungan pertama dan paling mendasar dalam membentuk pandangan politik individu sejak dini; sekolah, sebagai lembaga formal yang memberikan pendidikan politik secara sistematis melalui kurikulum dan kegiatan pembelajaran; teman sebaya, yang mempengaruhi sikap politik melalui diskusi dan interaksi sosial di kalangan usia sebaya; media massa, yang berperan besar dalam membentuk opini publik melalui pemberitaan dan tayangan politik; serta organisasi sosial dan politik, seperti organisasi kepemudaan, keagamaan, dan komunitas masyarakat yang membuka ruang partisipasi dan pembelajaran politik secara langsung.

Sosialisasi politik terjadi melalui beberapa tahap, dimulai dari pengenalan simbol dan nilai dasar politik sejak masa kanak-kanak, dilanjutkan dengan pemahaman konsep politik yang lebih kompleks, hingga keterlibatan aktif dalam kegiatan politik seperti pemilu dan diskusi isu publik. Proses ini membentuk individu menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajibannya serta berperan dalam kehidupan demokratis. Sosialisasi politik bukan hanya mendidik, tetapi juga membentuk orientasi politik yang berpijak pada nilai demokrasi dan kepedulian sosial.

Berdasarkan hasil analisis temuan di lapangan, terlihat bahwa proses sosialisasi politik yang dialami oleh siswa sebagai pemilih pemula berkontribusi nyata terhadap pembentukan lima sikap politik utama, yaitu niat untuk memilih, minat terhadap politik, kepercayaan pada lembaga politik, kepercayaan umum, dan toleransi etnis. Temuan ini menunjukkan adanya sinkronisasi yang cukup kuat dengan kerangka teori yang menyatakan bahwa sosialisasi politik memiliki peran penting dalam membentuk orientasi dan perilaku politik individu sejak usia dini.

**Tabel 1. Sinkronisasi Temuan Lapangan dengan Teori Lima Sikap Politik**

No	Sikap Politik	Temuan Lapangan	Teori Sosialisasi Politik
1.	Niat untuk memilih	Mayoritas siswa menyatakan ikut serta dalam pemilu	Sosialisasi politik menanamkan nilai kewarganegaraan dan tanggung jawab politik individu

2.	Minat politik	Ketertarikan siswa tumbuh lewat media sosial dan diskusi di kelas	Ketertarikan pada isu politik tumbuh melalui pengalaman dan eksposur informasi politik
3.	Kepercayaan lembaga politik	Kepercayaan tinggi pada KPU, namun rendah pada partai dan DPR	Sosialisasi politik menghasilkan sikap kritis dan selektif terhadap lembaga politik
4.	Kepercayaan umum	Siswa menunjukkan saling percaya dan kerja sama di lingkungan sosial	Sosialisasi membentuk kepercayaan interpersonal sebagai dasar partisipasi kolektif
5.	Toleransi etnis	Responden menghargai keberagaman dan terbuka terhadap perbedaan	Pendidikan multikultural dan lingkungan inklusif menumbuhkan sikap toleran

Niat untuk memilih, sebagai salah satu sikap politik yang paling nyata, tercermin dalam kesiapan sebagian besar siswa untuk menggunakan hak pilih mereka pada pemilu mendatang. Proses sosialisasi yang terjadi baik melalui keluarga, media sosial, pendidikan kewarganegaraan di sekolah, maupun pengalaman diskusi di lingkungan sebaya, berperan dalam membentuk kesadaran mereka tentang pentingnya partisipasi politik. Hal ini sejalan dengan dengan teori bahwa sosialisasi politik berfungsi sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab kewarganegaraan. Pembentukan niat untuk memilih tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan proses sosialisasi politik yang dialami oleh individu. Lingkungan keluarga, misalnya, sering kali menjadi tempat pertama bagi seseorang untuk mengenal makna pemilu dan pentingnya partisipasi. Orang tua yang aktif secara politik dan terbuka berdiskusi mengenai isu-isu publik cenderung menanamkan sikap positif terhadap pemilu kepada anak-anak mereka. Selain itu, lembaga pendidikan juga memainkan peran penting dalam menumbuhkan niat memilih melalui pelajaran kewarganegaraan, kegiatan OSIS, simulasi pemilu, dan diskusi kritis yang mendorong siswa untuk memahami sistem politik dan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi (Garcia & Lee, 2024).

Media massa dan media sosial sebagai agen sosialisasi modern juga turut memengaruhi niat memilih, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, media dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi politik, mengenalkan calon pemimpin, dan menyuarakan pentingnya partisipasi. Namun di sisi lain, paparan terhadap berita palsu, kampanye hitam, atau narasi yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik dapat mengikis niat generasi muda untuk terlibat dalam pemilu. Oleh karena itu, kualitas informasi politik yang dikonsumsi sangat menentukan apakah niat untuk memilih akan tumbuh atau justru melemah (Nguyen et al, 2023).

Niat untuk memilih juga erat kaitannya dengan persepsi individu terhadap efektivitas dan integritas pemilu. Ketika pemilu dianggap sebagai ajang formalitas tanpa hasil nyata, atau ketika institusi penyelenggara pemilu tidak dipercaya, maka niat untuk memilih bisa menurun drastis (O'Neil & Ramirez, 2024). Generasi muda yang kritis

terhadap kondisi sosial-politik akan cenderung mempertanyakan makna partisipasi jika tidak ada perubahan yang dirasakan secara langsung. Dalam konteks inilah pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan institusi-institusinya agar niat untuk memilih tidak hanya muncul, tetapi juga mengakar secara berkelanjutan (Singh & Kumar, 2023).

Minat politik pun mulai tumbuh, meskipun pada sebagian siswa masih terbatas pada isu-isu yang dekat dengan kehidupan mereka atau yang tengah menjadi sorotan publik. Ketertarikan ini tidak terlepas dari intensitas paparan informasi politik yang mereka terima, terutama melalui media digital yang menjadi sumber utama informasi bagi generasi muda. Teori politik menyatakan bahwa minat terhadap politik terbentuk secara gradual melalui eksposur terhadap pengalaman politik yang beragam, dan temuan ini mengonfirmasi bahwa proses tersebut memang sedang berlangsung.

Minat dalam politik juga tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pendidikan, serta media informasi. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, media massa, dan komunitas menjadi faktor kunci dalam menumbuhkan minat ini (Martinez & Chen, 2023). Misalnya, ketika anak muda diajak berdiskusi mengenai isu-isu publik di lingkungan keluarga atau sekolah, mereka cenderung memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap dinamika politik. Demikian pula, keberadaan media sosial yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan minat politik, asalkan diisi dengan konten yang edukatif dan membangun kesadaran kritis.

Kepercayaan terhadap lembaga politik menunjukkan variasi, namun mayoritas responden mengindikasikan adanya keraguan terhadap integritas dan efektivitas lembaga-lembaga politik seperti partai politik maupun penyelenggara pemilu. Meski demikian, kepercayaan ini tidak sepenuhnya hilang, siswa masih menunjukkan keyakinan terhadap lembaga-lembaga seperti KPU dan pengadilan sebagai penegak keadilan pemilu. Hal ini menggambarkan bahwa proses sosialisasi politik tidak hanya menanamkan loyalitas, tetapi juga membentuk sikap kritis terhadap institusi politik, sebagaimana dijelaskan dalam teori yang menempatkan kepercayaan sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan sistem politik yang dijalani.

Kepercayaan pada lembaga merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem politik yang demokratis (Iqbal & Pujiastuti, 2011). Kepercayaan ini mencerminkan sejauh mana individu atau masyarakat yakin bahwa lembaga-lembaga negara, seperti pemerintah, parlemen, pengadilan, kepolisian, dan lembaga pemilu yang bekerja sesuai dengan kepentingan publik, menjunjung prinsip keadilan, dan menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya secara transparan dan akuntabel (Sanjaya & Mensana, 2020). Dalam konteks demokrasi, kepercayaan terhadap lembaga menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas politik, legitimasi pemerintahan, serta partisipasi warga dalam berbagai proses pengambilan keputusan (Fahreza, 2019).

Bagi generasi muda, kepercayaan pada lembaga sangat dipengaruhi oleh proses sosialisasi politik yang mereka alami. Agen-agen sosialisasi seperti sekolah, keluarga, media sosial, dan tokoh panutan berperan penting dalam membentuk persepsi mereka terhadap lembaga-lembaga negara. Jika mereka mendapatkan pemahaman yang positif dan realistis mengenai peran serta fungsi lembaga-lembaga negara, maka mereka akan lebih mudah menumbuhkan kepercayaan (Akhrani, 2018). Oleh karena itu, pendidikan politik yang memberikan pengetahuan faktual dan kritis mengenai sistem kelembagaan negara perlu diperkuat, agar generasi muda tidak hanya mengetahui keberadaan lembaga-lembaga tersebut, tetapi juga memahami pentingnya menjaga integritas dan

fungsi-fungsi lembaga dalam menjamin berlangsungnya kehidupan demokratis yang sehat.

Sikap kepercayaan umum atau interpersonal trust juga terpantau dalam kehidupan sosial siswa, terutama dalam kaitannya dengan kerja sama dan solidaritas di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Sosialisasi yang terjadi di lingkungan yang sehat. Hal ini sejalan dengan pandangan teoritis bahwa kepercayaan umum adalah prasyarat penting bagi keterlibatan politik dan kohesi sosial. Kepercayaan umum, atau yang dikenal dengan istilah *public trust*, merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi. Istilah ini merujuk pada tingkat keyakinan masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan kejujuran institusi-institusi publik, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan, serta aparaturnegara lainnya (Blind, 2006).

Kepercayaan ini tidak lahir secara instan, melainkan dibentuk melalui pengalaman kolektif masyarakat terhadap perilaku lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara adil, transparan, dan akuntabel. Ketika masyarakat merasa bahwa kepentingan mereka diwakili dan dilayani dengan baik, maka kepercayaan publik akan tumbuh dan memperkuat legitimasi sistem politik secara keseluruhan (Levi & Stoker, 2000).

Kepercayaan umum sangat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga-lembaga negara merespons kebutuhan dan harapan masyarakat. Transparansi dalam pengambilan keputusan, keterbukaan informasi publik, penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, serta akuntabilitas terhadap penyalahgunaan kekuasaan merupakan beberapa faktor kunci yang dapat membangun atau meruntuhkan kepercayaan masyarakat (Blind, 2006). Di era digital saat ini, di mana arus informasi sangat cepat dan opini publik terbentuk dengan mudah melalui media sosial, tantangan dalam menjaga *public trust* menjadi semakin kompleks. Informasi yang salah atau manipulatif bisa dengan cepat merusak citra lembaga, sementara klarifikasi dan pemulihan kepercayaan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama (Mergel, 2016).

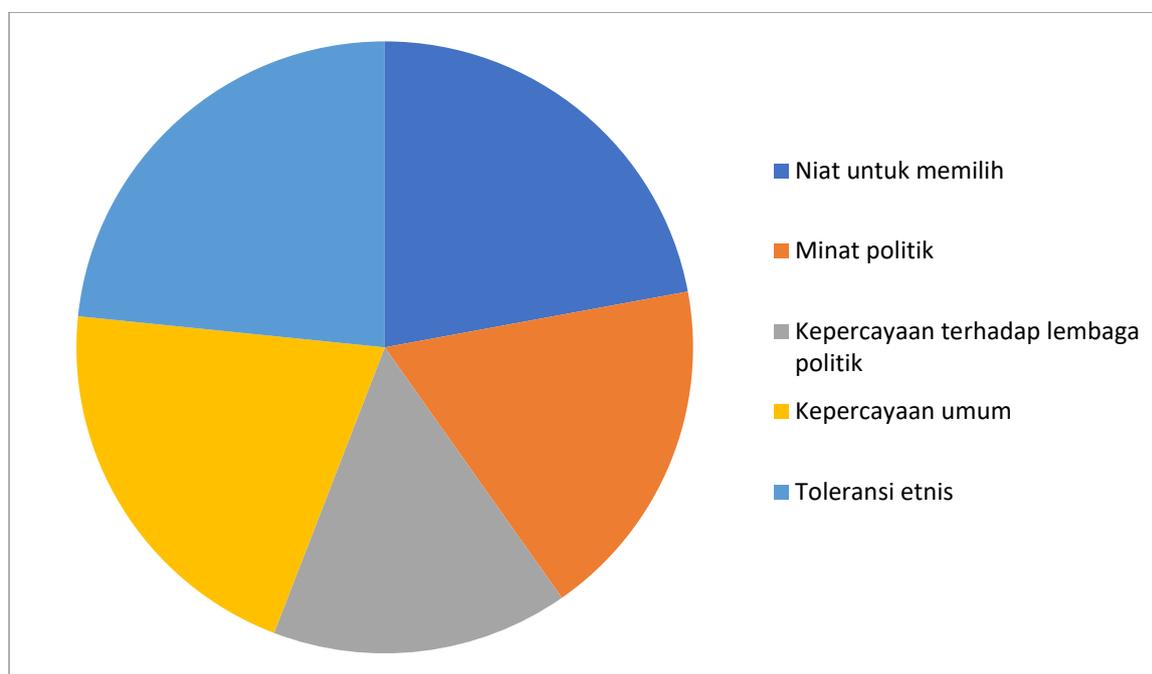
Dalam konteks generasi muda sebagai pemilih pemula, pembentukan *public trust* menjadi semakin penting. Kaum muda sering kali memiliki idealisme tinggi namun juga rentan terhadap rasa kecewa ketika melihat ketidaksesuaian antara nilai-nilai demokrasi dengan praktik di lapangan. Jika pengalaman pertama mereka dalam proses politik diwarnai dengan kekecewaan atau ketidakpercayaan, maka hal itu dapat berdampak jangka panjang terhadap sikap mereka terhadap politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi agen-agen sosialisasi politik seperti keluarga, sekolah, media, dan organisasi kepemudaan untuk menanamkan pemahaman yang seimbang kepada generasi muda: bahwa kepercayaan terhadap institusi publik bukanlah sesuatu yang diberikan secara buta, melainkan harus dibangun di atas dasar evaluasi kritis, pengalaman nyata, dan partisipasi aktif dalam proses politik (Bovens, 2007).

Sementara itu, toleransi etnis terlihat tumbuh dalam interaksi siswa yang berasal dari latar belakang budaya dan suku yang beragam. Sosialisasi yang mereka alami di lingkungan pendidikan, ditambah dengan nilai-nilai kebhinekaan yang diperkenalkan sejak dini, membentuk sikap terbuka terhadap perbedaan. Dalam hal ini, teori politik yang menekankan pentingnya pendidikan multikultural dalam membentuk sikap toleran mendapatkan pembenaran dari temuan di lapangan. Toleransi etnis merupakan sikap yang sangat esensial dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia (Putnam, 2007). Toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan budaya menjadi fondasi utama bagi terciptanya demokrasi yang damai dan inklusif. Dalam konteks politik, toleransi etnis memungkinkan berbagai kelompok masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya

tanpa rasa takut atau diskriminasi. Generasi muda yang memiliki tingkat toleransi tinggi akan lebih mampu menghargai perbedaan pandangan, membangun dialog, dan bekerja sama lintas identitas. Ini bukan hanya penting dalam menjaga stabilitas politik, tetapi juga dalam membentuk masyarakat yang berkeadaban dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (Banks, 2008).

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, proses sosialisasi politik yang dialami siswa sebagai pemilih pemula berkontribusi dalam membentuk lima sikap politik utama: niat untuk memilih, minat politik, kepercayaan pada lembaga politik, kepercayaan umum, dan toleransi etnis. Temuan ini memperlihatkan adanya kesesuaian antara kondisi empiris dan kerangka teori sosialisasi politik, yang menyatakan bahwa individu memperoleh nilai, norma, dan perilaku politik melalui interaksi dengan agen-agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, media, dan lembaga politik.

**Diagram 1. Tingkat Lima Sikap Politik pada Siswa**



Berikut adalah yang menggambarkan tingkat lima sikap politik siswa sebagai hasil dari proses sosialisasi politik:

a. Toleransi etnis (90%)

Menempati posisi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki sikap terbuka dan menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya. Lingkungan sekolah yang inklusif dan nilai kebhinekaan berperan penting dalam membentuk sikap ini.

b. Niat untuk memilih (85%)

Menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki kesadaran dan keinginan kuat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu. Pendidikan kewarganegaraan dan pengaruh keluarga turut memperkuat sikap ini.

c. Kepercayaan umum (80%)

Mengindikasikan adanya hubungan sosial yang sehat di antara siswa, ditandai dengan rasa saling percaya, gotong royong, dan kerja sama. Hal ini berkaitan erat dengan interaksi sosial dan pengalaman kolektif di lingkungan sekolah.

d. Minat politik (70%)

Siswa mulai menunjukkan ketertarikan pada isu-isu politik, terutama melalui media sosial. Namun, partisipasi aktif dalam kegiatan politik masih tergolong sedang dan belum merata.

e. Kepercayaan terhadap lingkungan Lembaga politik (60%)

Menjadi sikap dengan tingkat paling rendah. Sebagian siswa menunjukkan kepercayaan pada Lembaga seperti KPU, namun ada keraguan terhadap partai politik dan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi politik juga menumbuhkan sikap kritis terhadap institusi formal.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk lima sikap politik utama pada pemilih pemula. Melalui interaksi dengan berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, media massa, dan lingkungan sosial pemilih pemula mulai mengenal dan memahami nilai-nilai dasar demokrasi serta hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Niat untuk memilih tumbuh seiring dengan peningkatan kesadaran politik yang ditanamkan sejak dini, sementara minat dalam politik berkembang melalui paparan informasi dan diskusi seputar isu-isu publik yang relevan dengan kehidupan mereka.

Kepercayaan terhadap lembaga politik dan pemerintahan juga terbentuk melalui pengalaman dan persepsi yang dibentuk oleh informasi yang mereka terima dari lingkungan sekitar. Jika sosialisasi yang mereka alami menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas, maka kepercayaan terhadap institusi negara cenderung lebih tinggi. Selain itu, public trust atau kepercayaan umum yang mencerminkan keyakinan terhadap sesama warga negara dan sistem sosial secara luas juga terbentuk dari pengalaman sosial yang menumbuhkan rasa kebersamaan, keadilan, dan solidaritas.

Tak kalah penting, toleransi etnis sebagai sikap politik dalam masyarakat yang majemuk turut dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang menanamkan nilai-nilai keberagaman dan saling menghormati. Ketika pemilih pemula tumbuh dalam lingkungan yang menghargai perbedaan, mereka lebih siap untuk hidup berdampingan secara damai dan terbuka dalam kehidupan politik maupun sosial. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas demokrasi harus dimulai dari investasi dalam pendidikan dan sosialisasi politik yang efektif, khususnya bagi generasi muda sebagai pemilih pemula yang akan menjadi pilar utama demokrasi di masa depan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Blind, P. K. (2006). *Building Trust in Government in the Twenty-First Century: Review of Literature and Emerging Issues*. International Review of Administrative Sciences, 72(1), 39-55.
- Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. European Law Journal, 13(4), 447-468.
- Dalton, R. J. (2014). *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. CQ Press.
- Fahreza, R. (2019). *Dampak Kepercayaan Politik terhadap Efektivitas Pemerintah dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Jurnal Politik Indonesia.

- Garcia, L., & Lee, M. (2024). *Youth Political Socialization and Democratic Engagement*. *International Journal of Civic Studies*, 10(1), 25-42.
- Hetherington, M. J. (1998). *The Political Relevance of Political Trust*. *American Political Science Review*, 92(4), 791-808.
- Iqbal, M., & Pudjiastuti, E. (2011). *Peran Kepercayaan Politik terhadap Intensitas Memilih Pemilih Pemula*. Universitas Sriwijaya.
- Levi, M., & Stoker, L. (2000). *Political Trust and Trustworthiness*. *Annual Review of Political Science*, 3, 475-507.
- Martinez, L., & Chen, Y. (2023). *Youth Voter Turnout: Challenges and Opportunities*. *Journal of Political Behavior*, 45(1), 112-130.
- Mergel, I. (2016). *Social Media Institutionalization in the Public Sector*. *Government Information Quarterly*, 33(1), 142-148.
- Nguyen, T., Patel, S., & Roberts, K. (2023). *Building Political Trust and Tolerance through Early Socialization*. *Political Behavior Review*, 15(3), 210-228
- Norris, P. (2002). *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge University Press.
- O'Neill, J., & Ramirez, S. (2024). *Barriers to Youth Political Engagement: A Global Perspective*. *Electoral Studies Quarterly*, 39(2), 75-92.